



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN II
2019

Penyusun:

Penanggung Jawab: Tauhid I Ketua Tim: Siti Rosidah Sundari I
Editor: Jaka Trisna I Desain Grafis: Firdaus I Anggota: Suburl
Armizali I Lukas Wanastya I Markus Yulianto I

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sumsel

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2019 ini.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun bagi para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyediakan data dan informasi hingga terbitnya Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami harapkan koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan pengelolaan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan dan dapat diterbitkannya hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan secara berkala. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan agar perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas hasil kajian dapat terus dilakukan.

Harapan kami semoga laporan hasil Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi penting dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, *stakeholders* di Sumatera Selatan, dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Agustus 2019
Kepala Kantor Wilayah,

Taukhid



DAFTAR ISI

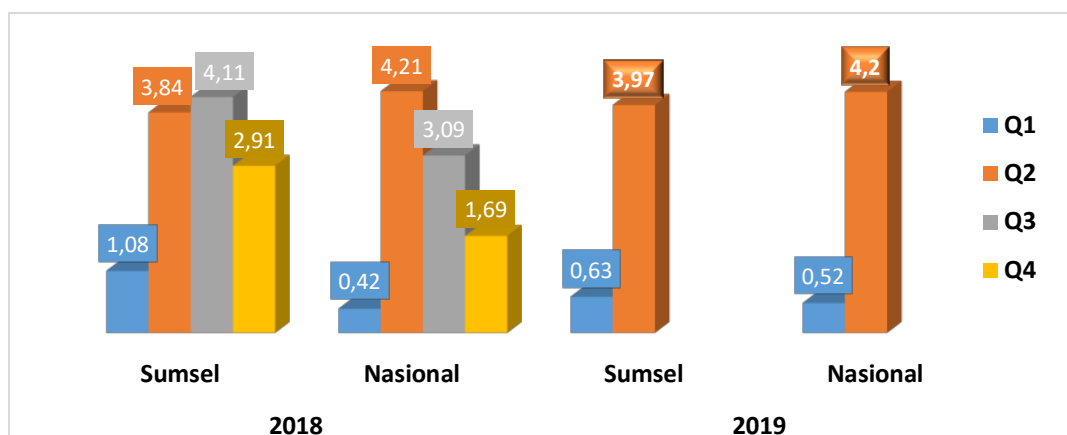
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	2
C. Indikator Kesejahteraan	2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	
A. Pendapatan Daerah.....	14
B. Belanja Daerah.....	17
C. Prognosis Realisasi APBD.....	18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	19
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	24

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

Grafik I.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan 2019 (q-to-q)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

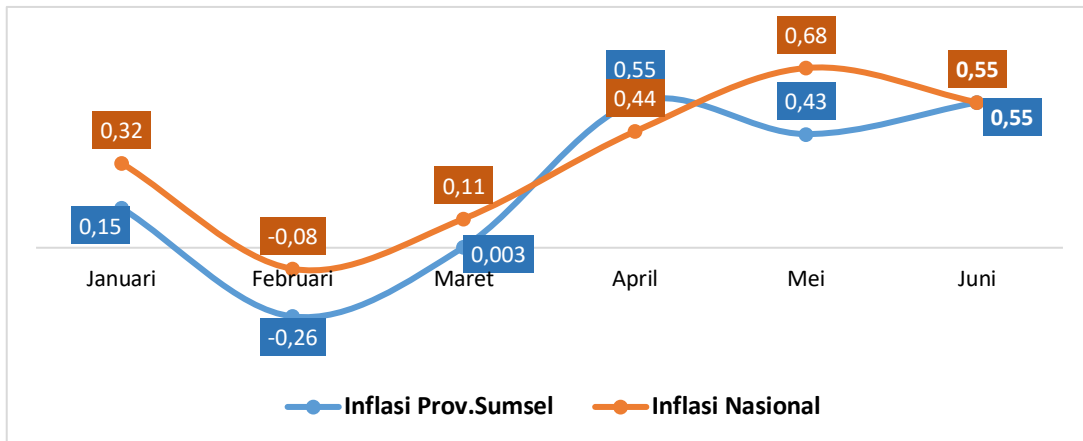
PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2019 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,97 persen (q-to-q), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PDB nasional yang tumbuh sebesar 4,20 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 5,50 persen seiring dengan musim panen dari produk-produk pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 47,38 persen sebagai andil dari meningkatnya serapan Belanja Pemerintah.

Secara *year-on-year*, PDRB Provinsi Sumatera Selatan triwulan II tahun 2019 tumbuh sebesar 5,80 persen, angka ini lebih tinggi daripada nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 16,41 persen. Hal ini seiring dengan pesatnya industri perhotelan dan makan minum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 12,87 persen.

B. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Grafik I.2. Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi bulanan pada Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2019 berfluktuasi. Pada bulan Juni 2019 terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya dimana inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,55 persen. Angka ini sama persis jika dibandingkan dengan tingkat inflasi secara nasional. Adapun komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada bulan Juni 2019 di Provinsi Sumatera Selatan adalah cabe merah, emas perhiasan, daging ayam ras, ketimun, beras, tomat sayur dan angkutan antar kota.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

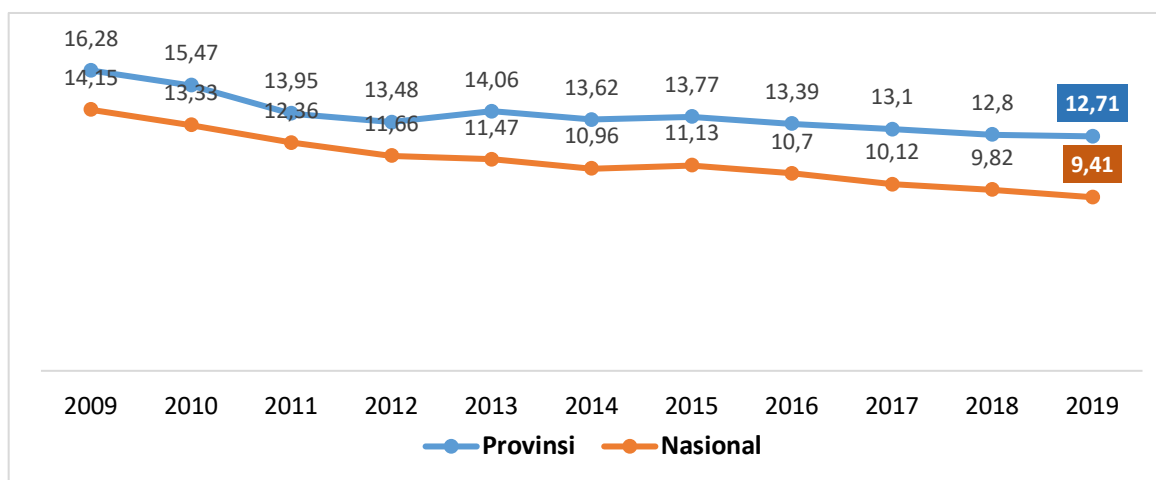
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data pada bulan Februari 2019 TPT di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 3,99 persen, mengalami penurunan dibandingkan bulan Februari 2018 sebesar 4,02 persen atau turun sebesar 0,03 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan penduduk bekerja, yaitu: pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air, perdagangan, angkutan dan komunikasi, aktivitas keuangan dan real estate, dan jasa lainnya.

Disisi lain jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2019 sebanyak 4,34 juta orang, berkurang sebanyak 28,6 ribu orang atau turun sebesar 0,66 persen dibandingkan Februari 2018. Berkurangnya angkatan kerja menunjukkan bahwa angkatan kerja yang terserap semakin tinggi ditengah perekonomian yang terus tumbuh. Hal ini merupakan imbas dari semakin membaiknya harga sawit di pasaran sehingga banyak masyarakat yang kembali jadi petani sawit.

2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin diukur berdasarkan tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp446.706,00 di perkotaan dan Rp389.786,00 di pedesaan.

Grafik I.3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2019 di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.073,74 ribu orang atau sebesar 12,71 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan periode September 2018 yang sebesar 12,82 persen, sedangkan jumlahnya berkurang sebanyak 2,66 ribu orang dari 1.076,40 ribu orang. Meskipun demikian penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih di atas rata-rata penduduk miskin secara nasional yang sebesar 9,41 persen.

Jika dilihat dari target RPJMD, walaupun penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan namun masih belum memenuhi target persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 yang sebesar 11,78 persen. Diharapkan pada sisa tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi di bawah 10 persen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pengelolaan BLU dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat. Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel II.1. yang disajikan dalam format *I-Account* dibawah ini.

Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Periode Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018			2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
A. PENDAPATAN NEGARA	14.338,71	4.604,12	32,1	15.103,90	5.197,68	34,4	17.289,14	5.268,57	30,5
I. Penerimaan Perpajakan	12.899,72	3.820,69	29,6	13.538,05	4.368,18	32,3	16.016,81	4.344,67	27,1
II. PNPB	1.438,99	783,43	54,4	1.565,85	829,5	53,0	1.272,33	923,9	72,6
III. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	49.534,39	25.425,74	40,7	43.686,36	18.525,50	42,4	48.075,36	21.303,26	44,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	13.758,23	4.588,34	33,3	15.102,89	4.477,61	29,6	15.507,07	5.437,10	35,1
1. Belanja Pegawai	4.291,16	1.915,04	44,6	4.655,04	2.094,01	45,0	4.389,58	2.293,55	52,2
2. Belanja Barang	5.177,77	1.679,98	32,4	6.835,64	1.627,29	23,8	7.159,17	2.546,61	35,6
3. Belanja Modal	4.262,83	989,98	23,2	3.598,64	752,66	20,9	3.941,26	592,76	15,0
4. Belanja Sosial	26,47	3,34	12,6	13,57	3,65	26,9	17,07	4,18	24,5
5. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0		0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	35.776,16	15.593,27	43,6	28.583,47	14.047,89	49,1	32.568,29	15.866,16	48,7
1. Transfer ke Daerah	33.508,90	14.239,25	42,5	26.269,34	12.660,68	48,2	29.884,34	14.258,39	47,7
a. DBH	15.375,99	4.843,46	31,5	7.232,03	2.757,92	38,1	10.194,65	4.187,59	41,1
b. DAU	12.219,36	7.135,48	58,4	12.331,39	7.193,31	58,3	12.877,30	7.500,02	58,2
c. DAK Fisik	2.122,40	563,41	26,5	2.357,10	361,17	15,3	2.186,79	248,61	11,4
d. DID	82,5	82,5	100,0	396,75	198,38	50,0	390,16	195,08	50,0
e. DAK Non Fisik	3.709,65	1.614,41	43,5	3.952,07	2.149,90	54,4	4.235,44	2.127,10	50,2
2. Dana Desa	2.267,26	1.354,01	59,7	2.314,12	1.387,21	59,9	2.683,95	1.607,77	59,9
C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)	-35.195,68	-15.577,49	44,3	-28.582,46	-13.327,82	46,6	-30.786,22	-16.034,69	52,1
D. PEMBIAYAAN	0	0		0	0	0	0	0	0

Sumber : OM-SPAN, Monev PA, MPN-G2, Simtrada DJPK (diolah)

Pada tabel II.1. di atas, struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan dan PNPB. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar Rp5.27 triliun atau 30,47 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak dengan capaian sebesar 27,13 persen dan PNPB sebesar 72,61 persen. Komponen Hibah bernilai nihil karena pendapatan Hibah hanya terdapat pada level kementerian/lembaga atau pada APBN tingkat nasional sedangkan Hibah yang terdapat di satuan kerja daerah dicatat sebagai belanja. Sama halnya dengan sisi Pembiayaan yang hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil.

Sisi belanja dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada Belanja Pemerintah Pusat, penyerapan belanja terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2018 menjadi 35,06 persen. Adapun realisasi TKDD relatif sama dengan realisasi pada tahun 2018 yang sebesar 48,72 persen. Kondisi Pendapatan dan Belanja diatas menyebabkan APBN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar Rp16,03 triliun yang menunjukkan bahwa arus kas masuk ke Sumatera Selatan melalui APBN lebih besar daripada arus kas yang keluar.

A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dibagi menjadi Penerimaan Pajak dan PNBP.

1. Pendapatan Perpajakan

Total pendapatan pajak di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II 2019 berjumlah Rp4,31 triliun. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar Rp3,76 miliar. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pajak:

Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan Periode s.d Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)

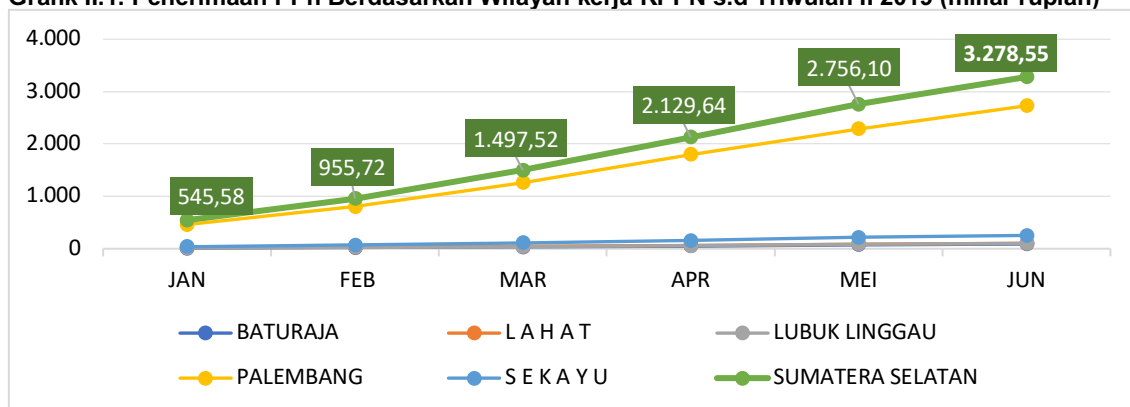
Jenis Pajak	Realisasi s.d. Triwulan II 2019		
	2017	2018	2019
PPh	2,601.69	3,195.07	3,278.55
PPN	1,069.91	1,185.83	983.78
PBB	31.34	-137.23	21.57
Cukai	0.08	0.06	0.06
Pajak Lainnya	53.75	58.90	22.49
JUMLAH	3.756,76	4.302,62	4.306,39

Sumber : MONEVPA OMSPAN 07-08-2019 (diolah)

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan total pajak penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2019 berjumlah Rp3,27 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN sebagai berikut:

Grafik II.1. Penerimaan PPh Berdasarkan Wilayah kerja KPPN s.d Triwulan II 2019 (miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OMSPAN 07-08-2019 (diolah)

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 83,23% disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu dengan selisih nominal yang mencapai Rp 3 triliun. Besarnya selisih tersebut menunjukkan bahwa pesebaran lapangan usaha masih terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang. Adapun pendapatan terendah terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Baturaja dengan realisasi sebesar Rp89,99 miliar atau sekitar 2,74% dari total pendapatan pajak penghasilan di Sumatera Selatan.

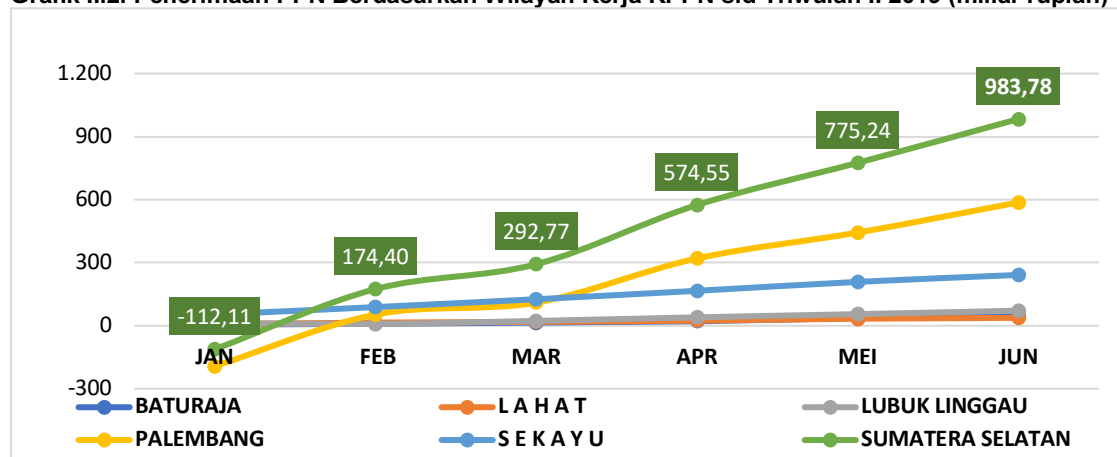
Dari grafik diatas terlihat bahwa tren pendapatan PPh pada triwulan II tahun 2019 terus mengalami kenaikan meskipun dengan adanya kebijakan percepatan restitusi pajak yang menyebabkan melonjaknya permintaan dan realisasi *restitusi pajak*.

Realisasi restitusi PPh lingkup Sumatera Selatan hingga Juni 2019 meningkat sebesar Rp81,53 Miliar atau 115% dari Realisasi Restitusi PPh periode yang sama pada tahun 2018.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Total Pendapatan PPN dan PPnBM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II 2019 sebesar Rp983,78 miliar dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik II.2. Penerimaan PPN Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan II 2019 (miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OMS PAN 07-08-2019 (diolah)

Berkebalikan dengan PPh, pendapatan PPN pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,04 persen dibandingkan tahun 2018 meskipun kondisi perekonomian semesteran bertumbuh sebesar 5,75 persen pada saat ini. Kondisi ini diindikasikan sebagai konsekuensi dari percepatan realisasi restitusi pajak sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Realisasi PPN sempat bernilai negatif di bulan januari akibat

pengembalian kelebihan bayar PPN Tahun 2018 sebesar 300,04 miliar yang direalisasikan pada tanggal 10 Januari 2019 di Kabupaten OKI.

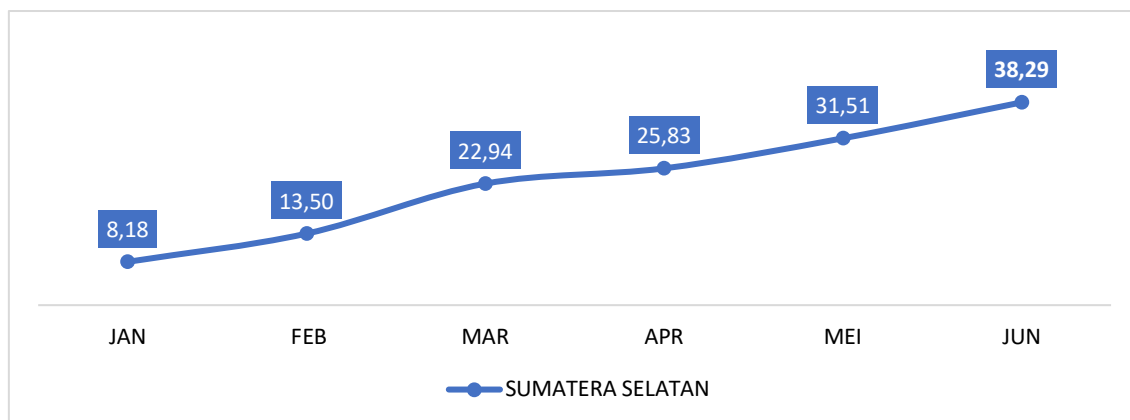
Kab/kota di wilayah kerja KPPN Palembang menjadi kab/kota penyumbang pendapatan PPN tertinggi di lingkup Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi penerimaan sebesar 59,65 persen dibandingkan total realisasi PPN di Sumatera Selatan. Jumlah ini tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kontribusi PPh diatas, yang mengindikasikan bahwa aktifitas pertambahan nilai dari barang/jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen atau aktifitas usaha pengolahan yang sudah dapat dikenakan pajak tidak terlalu terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang lagi meskipun jumlahnya masih relatif kecil.

Realisasi restitusi PPN di Sumatera Selatan s/d Triwulan II 2019 mencapai Rp1,02 triliun atau sebesar 53,06% dari Setoran PPN lingkup Sumatera Selatan yang sebesar Rp1,92 triliun.

c. Pendapatan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Cukai dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan II 2019 berjumlah Rp38,29 miliar. Jumlahnya menurun 44,29% dibanding pendapatan Triwulan II tahun 2018 yang sebesar Rp64,64 miliar.

Grafik II.3. Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional s.d Triwulan II 2019 (miliar rupiah)



Sumber : MONEVPA OM-SPAN 07-08-2019 (diolah)

Pendapatan pada sub bab ini merupakan jenis pendapatan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berbeda halnya dengan data perpajakan yang disajikan per KPPN, data pendapatan cukai dan perdagangan internasional disajikan secara total dikarenakan tempat transaksi dari jenis pendapatan ini berpusat di Kota Palembang. Dari gambar diatas, selama periode berjalan sampai dengan triwulan II 2019 Pendapatan Cukai dan Pendapatan Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan senantiasa bertambah. Meskipun jumlahnya menurun 41,65 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 dipengaruhi oleh

menurunnya nilai ekspor dan impor di Sumatera Selatan masing-masing sebesar 7,10 persen dan 49,10 persen pada periode yang sama.

Dari ketiga subbab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aktifitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan sebagian besar masih terpusat pada Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang selaku ibukota provinsi dan Kab/kota di wilayah kerja KPPN Sekayu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ibukota provinsi.

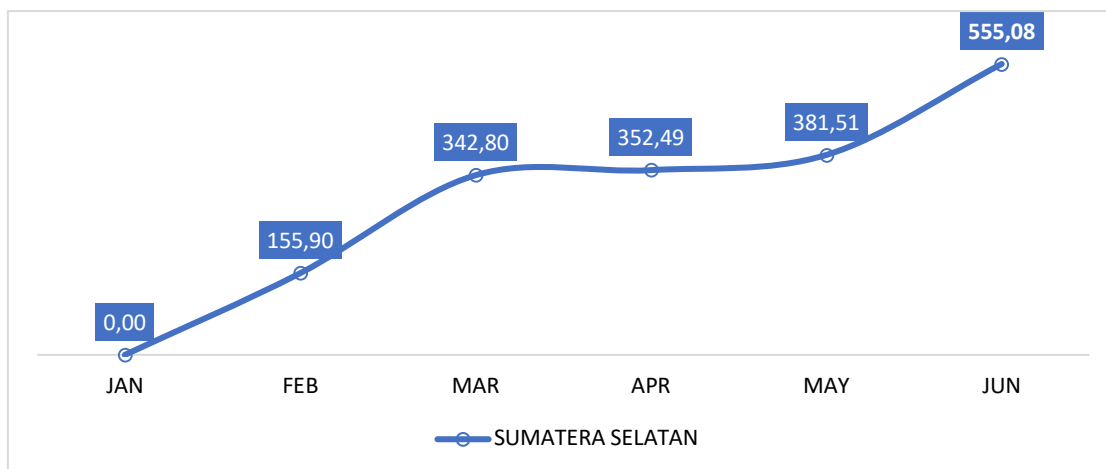
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Total penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II 2019 berjumlah Rp923,90 miliar yang dominan berasal dari Pendapatan Lainnya dan Pendapatan BLU. Penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019.

a. Pendapatan BLU

Sesuai dengan namanya, pendapatan PNBPN yang terakhir ini berasal dari Satker BLU (Badan Layanan Umum). Terdapat 8 BLU di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pendapatan sampai dengan triwulan II 2019 sebesar Rp555,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II.4. Realisasi PNBPN BLU di Sumatera Selatan s/d Triwulan II 2019 (miliar rupiah).



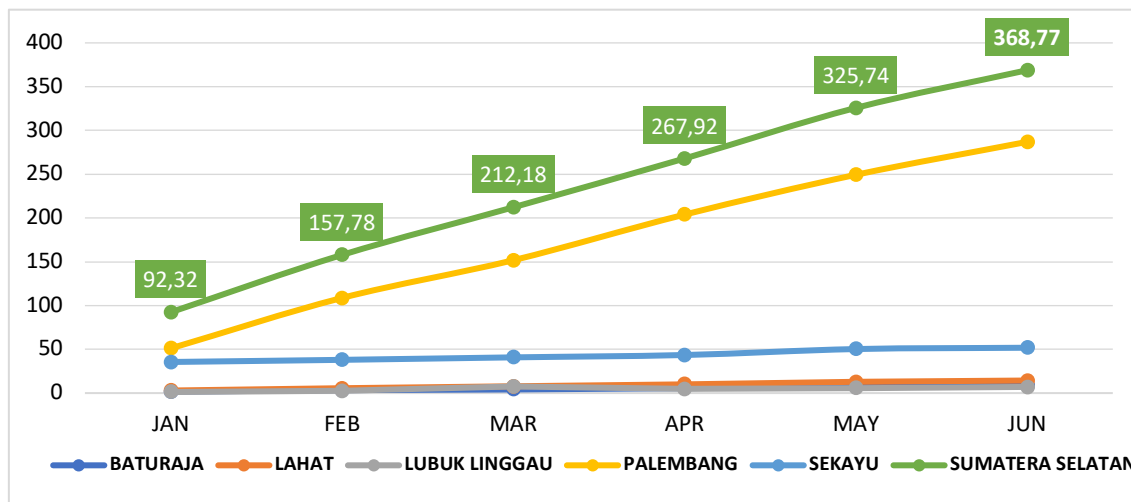
Sumber : OM-SPAN (diakses 07-08-2019)

Dari grafik diatas terlihat bahwa penerimaan PNBPN BLU meningkat pesat pada bulan Juni 2019 dari sebelumnya Rp381,51miliar menjadi Rp555,08 miliar yang berasal dari BLU besar Bidang Kesehatan yaitu Rumah Sakit Muhamad Husen dan Rumah Sakit Bhayangkara serta BLU Bidang Pendidikan yaitu Universitas Sriwijaya.

b. Penerimaan PNBPN Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan triwulan II 2019 berjumlah Rp368,77 miliar atau 39,92 persen dari total PNBPN keseluruhan. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan 370 satker, baik satker umum maupun satker PNBPN. Pendapatan terbesar pada akun Pendapatan dari BPJS Kesehatan FKTP sebesar Rp75,90 miliar.

Grafik II.5. Realisasi PNBP Lainnya Berdasarkan Wilayah Kerja KPPN s.d Triwulan II 2019 (miliar rupiah)



Sumber : OM-SPAN (diakses 07-08-2019)

Dari 17 Kab/Kota Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Palembang dengan nilai kontribusi sebesar 83,23% disusul kemudian Kab/Kota di wilayah kerja KPPN Sekayu dengan selisih yang mencapai Rp225 miliar. Hal ini disebabkan oleh jumlah satker pengguna PNBP belum banyak tersebar di Kab/Kota di luar wilayah kerja KPPN Palembang

Adanya sisa Surplus Bank Indonesia dan setoran deviden periode s/d Juni yang masing-masing sebesar Rp30 triliun dan Rp 38,63 triliun menyebabkan PNBPNasional meningkat sebesar 93,33 persen secara yoy

B. Belanja Negara

Belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan I tahun 2019 berjumlah Rp1,99 triliun dengan rincian sebagai berikut:

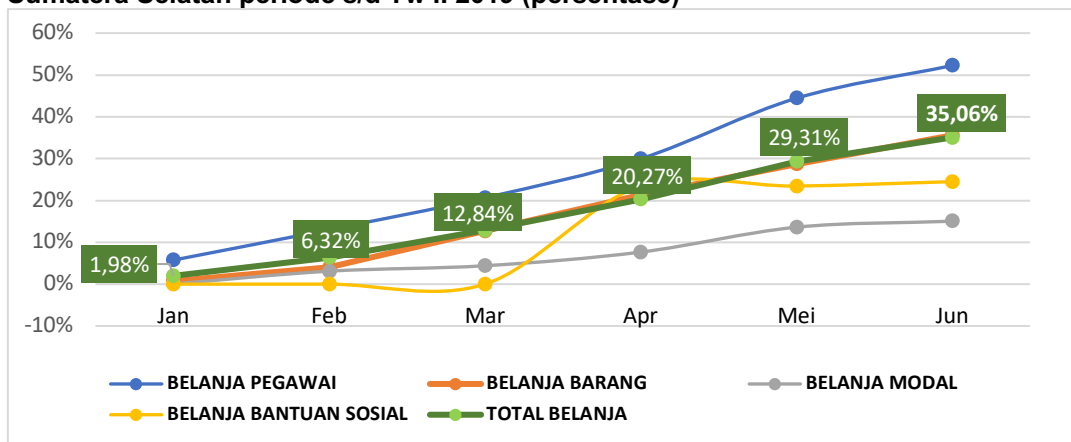
Tabel II.3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja s/d Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)

Jenis Belanja	2017		2018		2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	4.291,16	7.159,17	4.655,04	2.094,01	4.389,58	2.293,55
Belanja Barang	5.177,77	1.679,98	6.835,64	1.627,29	7.159,17	2.546,61
Belanja Modal	4.262,83	989,98	3.598,64	752,66	3.941,26	592,76
Belanja Bansos	26,47	3,34	13,57	3,65	17,07	4,18
Jumlah	13.758,23	9.832,47	15.102,89	4.477,61	15.507,07	5.437,10

Sumber: OM SPAN (diakses 06-08-2019)

Pagu belanja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,68 persen dibandingkan pagu tahun 2018. Pagu belanja yang mengalami peningkatan paling tinggi dibanding tahun 2018 adalah Pagu Belanja Modal yang meningkat sebesar Rp342,62 miliar, diikuti oleh belanja barang sebesar Rp323,52 miliar, sementara Pagu Belanja Pegawai menurun. Peningkatan Pagu Belanja Modal didominasi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 84,93 persen dari seluruh peningkatan Pagu Belanja Modal, diikuti oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan belanja Modal Tanah hal ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk melakukan pembangunan dari sisi infrastruktur.

Grafik II.6 Perkembangan Bulanan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode s/d Tw II 2019 (persentase)



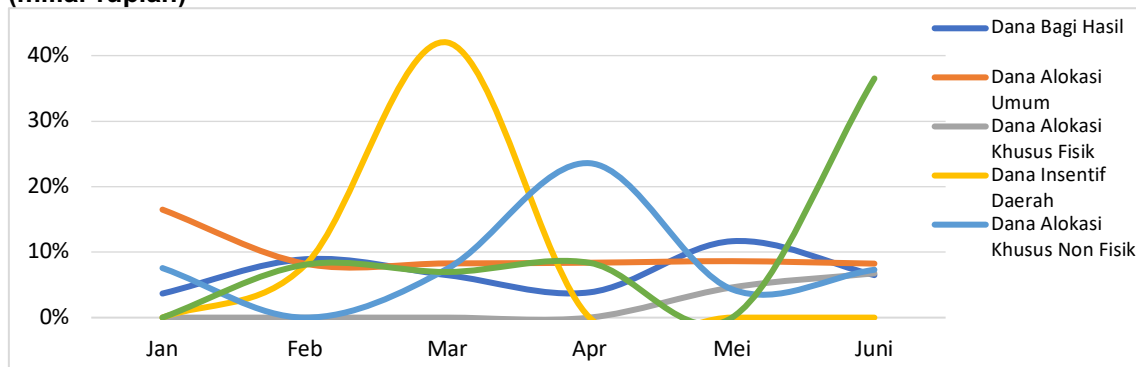
Sumber: Monev PA OM SPAN (diakses 06-08-2019)

Realisasi Total Belanja s/d Tw II pada tahun 2019 mencapai 35,06 persen, meningkat dibanding Realisasi periode yang sama pada Tahun 2018 yang sebesar 29,57 persen. Namun begitu angka tersebut masih dibawah target realisasi triwulanan yang sebesar 40 persen dikarenakan kontribusi realisasi Belanja Modal yang masih rendah.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD pada tahun 2019 mendapat alokasi pagu Rp32,57 miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp14,75 miliar atau 45,29 persen. Secara keseluruhan realisasi TKDD sampai dengan Triwulan II 2019 yang disalurkan melalui DJPK mencapai Rp 14,01 triliun atau 50,58 persen dari pagu. Adapun pada tahun 2019, sampai dengan triwulan II sudah terdapat realisasi Dana Desa sebesar Rp1,61 triliun sedangkan pada DAK Fisik baru terealisasi 11,37 persen. Rendahnya realisasi DAK Fisik tersebut dikarenakan baru dimulainya proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemda pada bulan April 2018. Realisasi DAK Fisik baru akan mencapai puncaknya pada Triwulan III tahun 2018 (Juli-September) karena mayoritas realisasi DAK Fisik tahap I dan II terjadi pada periode tersebut.

Grafik II.7. Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan II Tahun 2019 (miliar rupiah)



Sumber: MONEVPA OM-SPAN (diakses 08-08-2019)

3. Pengelolaan BLU

Dalam menganalisa pengelolaan dana dan peningkatan layanan digunakan rasio BOPO yaitu menunjukkan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Data yang digunakan untuk menghitung BOPO adalah Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Beban Barang dan Jasa BLU.

Tabel II.4. Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan II Tahun 2019 (miliar rupiah)

Nama BLU	PNBP BLU	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Belanja Sumber Dana BLU	Beban Barang dan Jasa BLU	BOPO
RSUP DR. Moh. Hoesin	268.53	264.46	243.74	130.06	49,18%
Universitas Sriwijaya	211.72	186.24	131.01	123.08	66,09%
UIN Raden Fatah Palembang	41.99	41.22	26.84	26.41	64,07%
Rumkit Bhayangkara Palembang	20.29	19.72	15.29	8.13	41,21%
Poltek Penerbangan Palembang	2.2	2.08	1.38	1.38	66,15%
Balai Besar Labkes Palembang	6.69	6.50	5.3	4.37	67,27%
RS Kusta Dr.Rivai Abdullah Palembang	1.8	1.80	1.48	1.48	82,04%
PTSDP Palembang	1.85	1.82	0.77	0.77	42,12%
Total	555.08	523.85	425.81	295.67	56,44%

Sumber: MONEVPA OM-SPAN (diakses 08-08-2019)

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa keseluruhan BLU memiliki nilai BOPO 56,44% yang dapat diartikan bahwa dalam menyediakan layanan, BLU tidak memungut tarif yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional kecil dan lebih dari setengahnya terpakai untuk operasional.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Tabel II.5. Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Posisi s.d. 30 Juni 2019

Debitur	Pinjaman (SLA)		
	Jumlah SLA	Penarikan	Hak Tagih Pemerintah
Pemkot Palembang	11	49,794,345,477.44	64,933,488,506.69

Pemkab Ogan Komering Ulu	1	155,566,680.00	-
Pemkab Musirawas	1	-	263,817,337.08
Pemkab Muara Enim	1	97,148,652,820.00	90,870,136,690.96
PDAM Tirta Musi Palembang	2	16,881,325,892.42	-
Posisi s.d. 2019	16	163,979,890,869.86	156,067,442,534.73
Posisi s.d. 2018	14	147,099,000,000.00	159,486,000,000.00

Sumber: SLIM (diakses 16-07-2019)

Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 4 debitur dengan 14 pinjaman (SLA) menjadi 5 debitur dengan 16 pinjaman (SLA). Rekonsiliasi outstanding pinjaman yang dilakukan semesteran berlangsung baik dengan akurasi rekonsiliasi yang mencapai 100 persen.

b. Kredit Program

Kredit Program yang gencar disalurkan oleh Pemerintah adalah program KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha (UMKM dan koperasi) yang produktif dan layak (feasible) namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (unbankable).

Tabel II.6. Penyaluran KUR Berdasarkan Skema s/d Juni Tahun 2017-2019 (miliar Rp)

Jenis KUR	Realisasi Penyaluran KUR					
	2016		2017		2018	
	Akad	Debitur	Akad	Debitur	Akad	Debitur
Mikro	561,66	28.465	682,94	33.275	738,60	34.966
Kecil	407,21	3.913	759,81	6.096	874,60	6.956
TKI	5,29	569	4,50	476	3,14	303
UMi	0,00	0	1,73	269	4,11	1.696
Jumlah	974,15	32.947	1.448,99	40.116	1.620,44	43.921

Sumber : SIKP (diakses 08-08-2019)

C. Prognosis Realisasi APBN

Analisis yang digunakan untuk menghitung prognosis Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2019 menggunakan analisis trend berdasarkan pagu/target dan realisasi tahun 2017-2018.

Tabel II.7. Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2019 (miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tw-II		Perkiraan Realisasi s.d. Tw-IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Negara	17.289,14	5.268,57	30,47%	12.312,58	71,22%
Penerimaan Pajak	16.016,81	4.344,67	27,13%	10.342,62	64,57%
PNBP	1.272,33	923,9	72,61%	1.957,75	153,87%
Belanja Negara	48.075,36	21.303,26	44,31%	44.376,61	92,31%
Surplus/Defisit	-30.786,22	-16.034,69	52,08%	-25.766,66	83,70%

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan APBD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Terdapat 3 (tiga) sub bab yang menjadi pokok bahasan yaitu Pendapatan, Belanja, dan Prognosis APBD.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018			2019		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
PAD	5.774	2.260	39%	6.688	2.713	41%	6.886	2.826	41%
Pajak Daerah	4.050	1.656	41%	4.317	1.986	46%	4.989	1.986	40%
Retribusi Daerah	238	69	29%	244	53	22%	233	60	26%
Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	200	124	62%	205	145	71%	212	173	82%
Lain-lain PAD yang Sah	1.286	412	32%	1.923	529	28%	1.453	607	42%
PENDAPATAN TRANSFER	26.997	15.560	58%	25.885	13.682	53%	31.583	15.877	50%
DBH Pajak	3.745	1.821	49%	3.519	1.365	39%	4.470	1.580	35%
DBH Bukan Pajak	3.224	2.650	82%	3.609	1.398	39%	5.246	2.565	49%
DAU	12.382	7.146	58%	12.312	7.129	58%	12.822	7.354	57%
DAK	6.059	2.580	43%	3.874	2.583	67%	5.858	2.354	40%
DID dan Dana Penyesuaian	785	506	64%	1.400	776	55%	1.644	887	54%
Transfer Provinsi	803	857	107%	1.172	431	37%	1.543	1.136	74%
LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.115	667	60%	2.009	713	35%	2.605	1.028	39%
Hibah	65	27	43%	638	11	2%	836	76	9%
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	15	36	242%	20	1	7%	102	8	8%
Pendapatan Lainnya	1.035	603	58%	1.351	700	52%	1.668	943	57%
TOTAL PENDAPATAN	33.886	18.487	55%	34.582	17.107	49%	41.074	19.731	48%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp19,73 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama Tahun 2018 namun realisasinya turun 1 persen dibandingkan Tahun 2018 dan 7 persen dibanding Tahun 2017. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan realisasi, namun komponen yang menyumbang peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dimana realisasi komponen PAD hanya meningkat sebesar Rp113 miliar dari Triwulan II Tahun 2018. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat secara nominal dibandingkan dua periode sebelumnya sehingga pada Triwulan II Tahun 2019 mencapai 39 persen dari pagu Rp2,6 triliun.

Sedangkan pada sisi realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp13,8 triliun, menurun masing-masing 5 persen dan 3 persen dibandingkan

dua periode yang sama Tahun 2018 dan 2017. Penurunan tersebut berasal dari realisasi bagi hasil ke kabupaten/kota/desa pada periode sebelumnya 51 persen menjadi 37 persen walau secara nominal meningkat drastis, sedangkan Belanja Modal dari tahun ke tahun realisasinya terus menurun dimana pada Triwulan II Tahun 2019 hanya mencapai 15 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat belanja modal merupakan belanja yang memiliki *multiplier effect* dalam jangka panjang terhadap perekonomian dibandingkan belanja operasi yang dampaknya hanya jangka pendek.

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar Rp)

APBD Klasifikasi Ekonomi	2017			2018			2019		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Belanja Operasi	23.790	9.722	41%	25.089	10.886	43%	26.734	10.433	39%
Belanja Pegawai	11.517	4.759	41%	12.146	5.031	41%	12.833	5.609	44%
Belanja Barang dan Jasa	7.009	2.367	34%	8.257	2.552	31%	9.825	3.096	32%
Belanja Bunga	14	5	37%	56	3	6%	65	18	28%
Belanja Subsidi	40	7	17%	40	16	40%	66	18	27%
Belanja Hibah	2.317	1.099	47%	2.091	2.067	99%	2.064	916	44%
Belanja Bantuan Sosial	15	2	16%	16	2	11%	25	3	10%
Belanja Bantuan Keuangan	2.879	1.482	51%	2.484	1.214	49%	1.855	773	42%
Belanja Modal	7.847	1.549	20%	7.847	1.415	18%	9.333	1.433	15%
Belanja Tanah	452	73	16%	513	81	16%	194	16	8%
Belanja Peralatan dan Mesin	1.581	331	21%	828	169	20%	969	239	25%
Belanja Gedung & Bangunan	1.285	256	20%	1.287	187	15%	1.556	181	12%
Belanja Jalan dan Jaringan	4.110	796	19%	4.842	883	18%	5.403	812	15%
Belanja Aset Tetap Lainnya	94	18	19%	354	72	20%	334	33	10%
Belanja KDP	321	74	23%	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	3	0	15%	22	22	100%	877	152	17%
Belanja Tak Terduga	114	6	5%	113	3	3%	129	3	2%
Transfer/ Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	887	423	48%	1.844	932	51%	5.295	1.977	37%
TOTAL	32.637	11.700	36%	34.893	13.236	38%	41.491	13.846	33%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

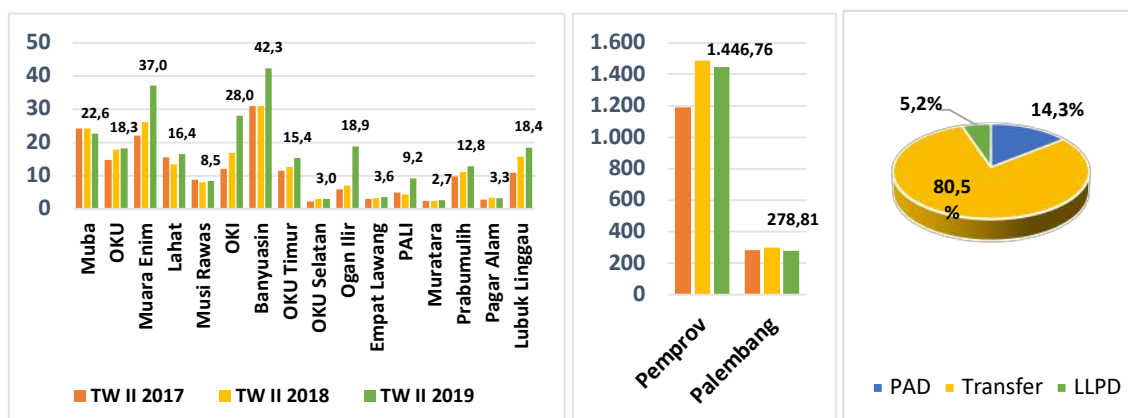
A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mencapai 48 persen dari target (Rp41,07 triliun).

1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah secara agregat sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mencapai Rp1,99 triliun atau mencapai 40 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian penerimaan pajak daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 6 persen dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2018.

Grafik III.1 Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

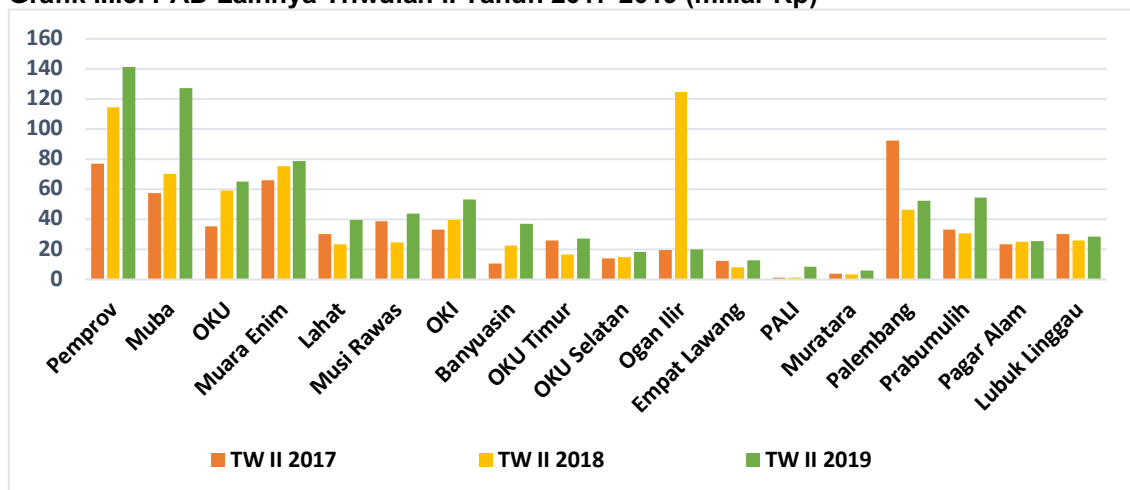
Provinsi Sumsel memberikan kontribusi terbesar capaian Pajak Daerah sebesar Rp1,447 triliun atau 73 persen dari agregat penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi Sumsel yang merupakan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan tingkat persentase capaian, Kabupaten Muratara merupakan yang terendah yaitu hanya mencapai 8,68 persen dari pagu Rp30,61 miliar. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah yaitu PAD 14,3 persen, Pendapatan Transfer 80,5 persen dan LLPD (Lain-lain pendapatan daerah yang sah) 5,2 persen. Berdasarkan kontribusi ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat sangat tinggi yang berarti pula bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah diperoleh dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah dimana mayoritas di bawah rata-rata regional (14,3 persen). Daerah yang berada di atas rata-rata regional yaitu Provinsi Sumatera Selatan 33 persen, Kota Palembang 22 persen sedangkan di Pemda yang relatif baru di Kabupaten Muratara jauh lebih rendah dari rata-rata regional yakni hanya mencapai 2 persen.

2. PAD Lainnya (RD, HPKD, LLPAD)

PAD lainnya merupakan komponen PAD selain pajak daerah yang meliputi Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) yang pada Triwulan II Tahun 2019 realisasinya mencapai Rp.839,90 miliar (44 persen dari target Rp. 1,897 triliun). Kinerja realisasi PAD lainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana realisasinya pada Triwulan II Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 masing-masing 35 persen, 30,6 persen dan 44 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya realisasi HPKD dimana pada Triwulan II Tahun 2019 mencapai 81,76 persen dari target Rp211,71 miliar.

Grafik III.3. PAD Lainnya Triwulan II Tahun 2017-2019 (miliar Rp)



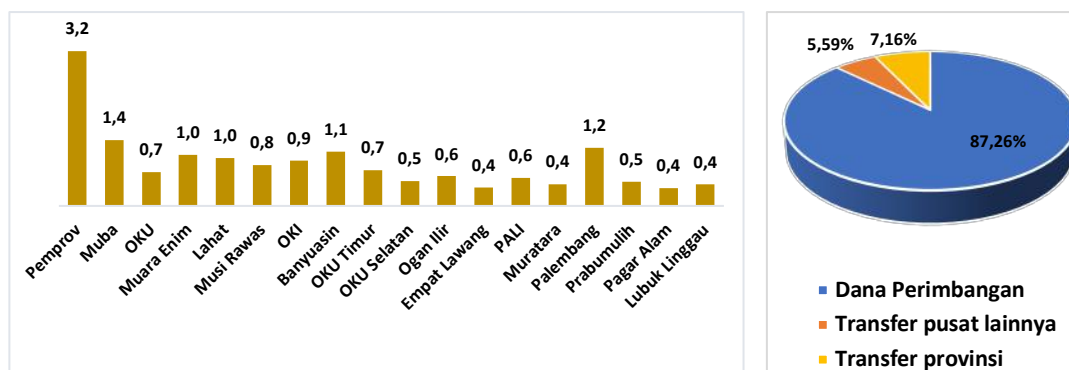
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa penerimaan daerah lainnya Triwulan II Tahun 2019 yang meningkat cukup signifikan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) didorong oleh realisasi Lain-lain PAD Yang sah pada Triwulan II Tahun 2019 telah mencapai Rp109,94 miliar atau 58,38 persen dari target Rp188,31 miliar sehingga menyebabkan nilai realisasinya menjadi yang tertinggi diantara 17 Pemda lainnya meski secara persentase Kabupaten OKU memiliki realisasi tertinggi dengan 87,21 persen. Hal ini antara lain bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

3. Penerimaan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 telah mencapai 50,3 persen dari target Rp31,58 triliun yaitu Rp15,88 triliun, yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Rp14,74 triliun dan transfer pemerintah provinsi Rp1,14 triliun.

Grafik III.5. Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan II Tahun 2019 (triliun Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019, diolah)

Dilihat dari komposisinya, penerimaan transfer pusat memberikan kontribusi di atas 87 persen dari total pendapatan transfer. Penerimaan Transfer Pusat Triwulan II Tahun 2019 didominasi oleh DAU (53%), DBH (30%), dan DAK (17%). Tingginya porsi DAU

yang melebihi DBH tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan desentralisasi dan perkembangan sektor migas yang belum membaik. Selain itu, DAK mendapatkan porsi yang signifikan sejalan dengan kebijakan transfer berbasis kinerja dimana penyaluran dana disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaannya.

Kapasitas penerimaan transfer tertinggi adalah Provinsi Sumsel (Rp3,2 triliun), dan Kabupaten Muba (Rp1,4 triliun) diikuti Kota Palembang (Rp1,2 triliun) dan Kabupaten Banyuasin (Rp1,1 triliun). Tingginya transfer di Kabupaten Muba didorong oleh produksi migas dan batubara di daerah tersebut.

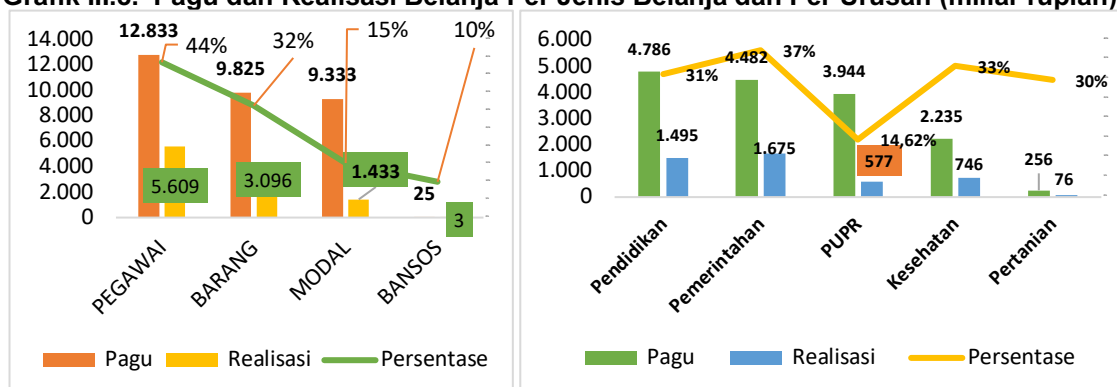
*“..Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo dalam pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
(<http://beritasriwijaya.co.id/2019/06/20/bupati-oku-selatan-teken-mou-bersama-kanwil-provinsi-sumatera-selatan>, diakses tanggal 7 Agustus 2019)*

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp13,85 triliun (33 persen dari pagu Rp41,49 triliun). **Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal**

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan jenis belanja dengan pagu tertinggi masing-masing Rp12,83 triliun dan Rp9,8 triliun dengan realisasi Rp5,61 triliun (43,7%) dan Rp3,1 triliun (31,5%). Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja produktif antara lain untuk infrastruktur realisasinya baru sebesar Rp1,4 triliun (15 persen). Belanja bantuan sosial dengan pagu dan realisasi yang terendah hanya 10 persen dari pagu, yang merupakan belanja bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Grafik III.8. Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Urusan (miliar rupiah)



Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019), diolah

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Metode yang digunakan untuk menghitung prognostik atau perkiraan realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah menggunakan analisis tren. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel III.3. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 dengan analisis tren (triliun rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	41.07	19.73	48.04%	39.00	94.95%
Belanja Daerah	41.49	13.85	33.37%	36.88	88.8%

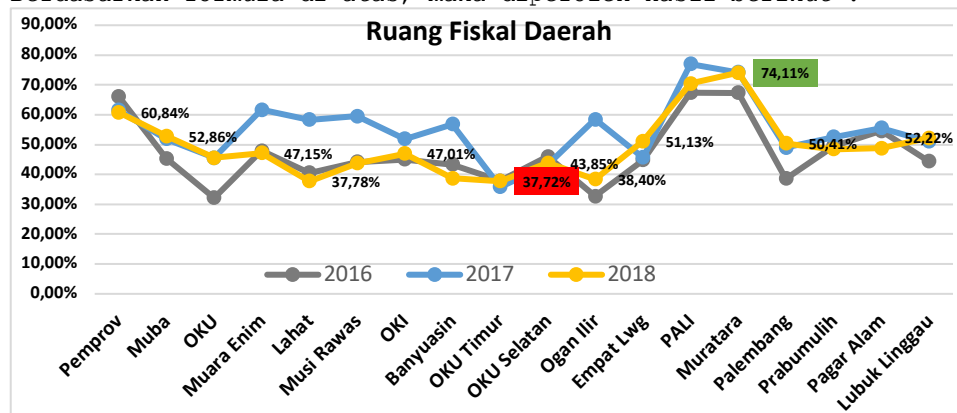
Box II : Analisis Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal merupakan ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah (Peter S. Heller, 2005). Ruang Fiskal dapat juga diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang menjadi prioritas.

$$\text{Ruang Fiskal} = \frac{\text{Belanja Daerah} - \text{belanja terikat}^*}{\text{Belanja Daerah}}$$

*belanja pegawai, bunga, subsidi, pendidikan dan belanja transfer

Berdasarkan formula di atas, maka diperoleh hasil berikut :



Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2019), diolah

Secara rata-rata ruang fiskal daerah di Sumatera Selatan yaitu 51 persen, dan dapat dikatakan bahwa Pemda cukup fleksibel dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan prioritas. Namun bila memperhitungkan realisasi belanja hibah di Pemprov Sumsel dalam tiga tahun terakhir ternyata cukup besar, dengan porsi mencapai 27 persen dari belanja (melampaui porsi belanja modal yang hanya 22 persen). Hal ini berdampak pada ruang fiskal daerah yang semakin sempit menjadi 42 persen.

Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat lebih selektif dalam belanja (*spending better*) sehingga dapat memperluas ruang fiskal daerah, dan pada akhirnya dapat semakin fleksibel dalam mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi daerah.

"..Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menempuh tiga strategi makro fiskal tahun 2020 untuk menstimulasi perekonomian diantaranya yaitu mobilisasi pendapatan dan *spending better* yang bertujuan untuk **memperlebar ruang fiskal**." (<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/20/14550951/pemerintah-akan-tempuh-tiga-strategi-fiskal-untuk-tingkatkan-pertumbuhan>, diakses tanggal 1 Agustus 2019)

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Pendapatan negara konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen pendapatan bukan pajak dan hibah. Pajak dalam negeri sebagai komponen terbesar pendapatan perpajakan menurun sebesar 0,40 persen dengan kontribusi mencapai 69,77 persen, sedangkan pada komponen hibah melonjak 17,1 persen dari tahun sebelumnya dan seluruhnya berasal dari hibah Pemerintah Daerah lainnya. Komponen pendapatan bukan pajak terjadi kenaikan sebesar 25,25 persen yang sebagian besar disumbangkan oleh komponen PNPB lainnya yang naik cukup signifikan.

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2019 (miliar Rupiah)

Uraian	2019				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	5.268,49	3.804,05	9.072,54	6,1%	8.548,62
Pendapatan Perpajakan	4.344,65	1.985,85	6.330,50	-0,4%	6.354,29
Pendapatan Bukan Pajak	923,84	1.742,20	2.666,04	25,2%	2.129,44
Hibah	0,00	76,00	76,00	17,1%	64,89
Transfer *)	0,00	14.755,69	12.899,31	-3,1%	13.314,84
Belanja Negara	5.437,27	11.096,22	16.533,49	-0,7%	16.656,45
Belanja Pemerintah	5.437,27	11.096,22	16.533,49	-0,7%	16.656,45
Transfer *)	1.856,38	1.580,30	1.580,30	-90,0%	15.814,19
Surplus/(Defisit)	-2.025,17	5.883,22	3.858,06	-148%	-8.107,84
Pembiayaan	0,00	1.770,28	1.770,28	-6810%	-26,38
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	1.960,30	1.960,30	332%	454,13
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	190,02	190,02	-60,5%	480,51
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-2.025,17	7.653,50	5.628,33	-169%	-8.134,22

*) Pendapatan Transfer dan Belanja/Pengeluaran Transfer dieliminasi

Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah.

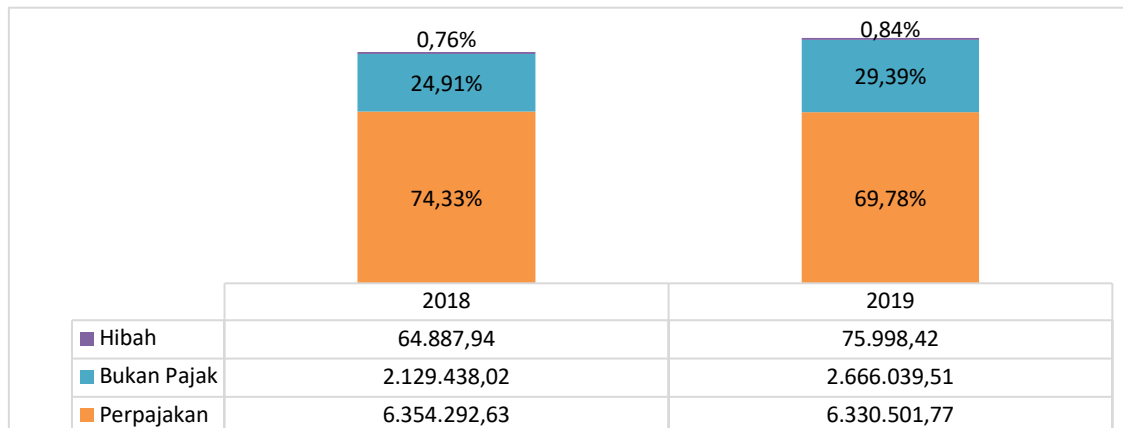
Pada komponen belanja negara terjadi penurunan 0,7 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja pemerintah terbesar terjadi pada belanja modal yang menurun 30,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan fisik belum dilakukan seperti pada Triwulan II Tahun 2018. Secara nominal, belanja negara masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar 47,79 persen.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

Analisis Proporsi dan Perbandingan

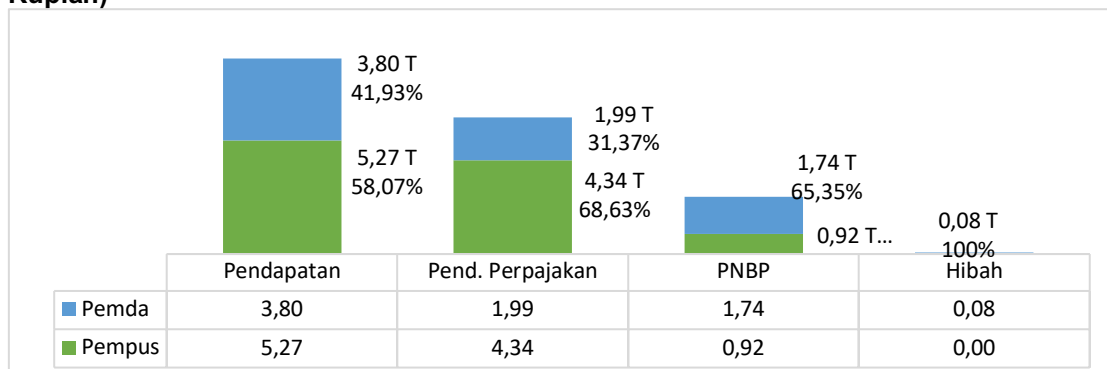
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian s.d. Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2018 (jutaan Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah.

Grafik IV.1 menunjukkan komposisi pendapatan konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 69,78 persen. Penerimaan perpajakan secara nominal menurun sebesar 0,4 persen atau mencapai Rp23,79 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penurunan belanja modal sehingga berdampak pada penerimaan dari sektor perpajakan. Penerimaan dari pendapatan bukan pajak mengalami kenaikan proporsi dari 24,91 persen naik menjadi 29,39 persen. Terdapat 2 (dua) komponen pendapatan yang tumbuh signifikan, yaitu penerimaan bukan pajak dalam negeri dan penerimaan hibah.

Grafik IV.2. Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2019 (triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019), diolah.

Grafik IV.2 menunjukkan bahwa pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan pemerintah pusat sebesar 58,07 persen, sedangkan pendapatan pemerintah daerah mencapai 41,93 persen. Apabila dilihat lebih detail lagi, pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan itu sendiri didominasi oleh penerimaan dari pemerintah pusat sebesar 68,63 persen. Namun dominasi pemerintah pusat tidak terjadi pada penerimaan bukan pajak, mayoritas penerimaannya berasal dari pemerintah daerah yang mencapai 65,35 persen. Sedangkan penerimaan lainnya, yaitu hibah seluruhnya berasal dari pemerintah daerah.

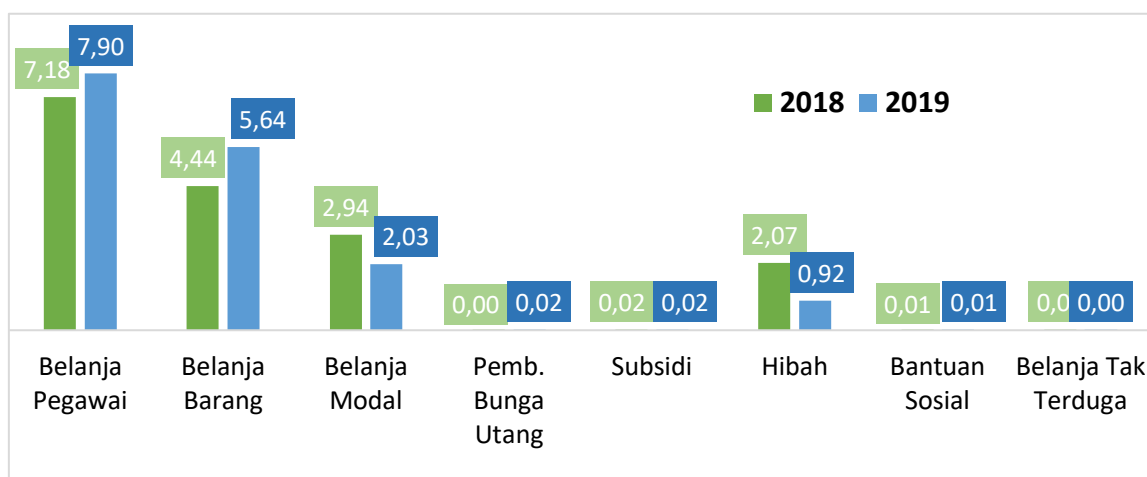
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,7 persen dari Rp16,66 triliun pada Triwulan II Tahun 2018 menjadi Rp16,53 triliun. Kontribusi belanja paling besar berasal dari belanja pegawai yang mencapai 47,79 persen dari total belanja konsolidasian. Namun apabila dilihat dari sisi pertumbuhan belanja, terdapat belanja dengan tingkat pertumbuhan terbesar yaitu belanja barang yang tumbuh sebesar 27,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja moda terjadi penurunan sebesar 30,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat produktif menurun dari tahun sebelumnya, sehingga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rincian belanja konsolidasian dapat dilihat pada Grafik IV.3 di bawah ini:

Grafik IV.3 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019 (triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2019, diolah).

Hal lain yang dapat dilihat secara lebih detail dari grafik di atas adalah belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 10,02 persen, sedangkan belanja barang naik 27,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jenis belanja lainnya seperti hibah

mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 55,55 persen. Belanja hibah ini berupa hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan organisasi kemasyarakatan. Untuk belanja bantuan sosial terjadi penurunan belanja sebesar 24,06 persen.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Pelaporan 2019:

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto	
Pendapatan	18.429.779.351.107
a Pajak	6.372.587.509.999
b Kontribusi Sosial	-
c Hibah	2.139.583.862.488
d Pendapatan Lain	9.917.607.978.620
Beban	5.251.985.490.822
a Kompensasi Pegawai	8.116.642.957.441
b Pembangunan Barang dan Jasa	5.158.304.265.497
c Konsumsi aset tetap	-
d Bunga	18.268.757.179
e Subsidi	17.865.834.621
f Hibah	(8.340.595.152.814)
g Manfaat Sosial	6.734.084.500
h Beban lainnya	274.764.744.400
Keseimbangan operasi bruto/neto	13.177.793.860.284
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	2.026.083.428.481
a Aset tetap	1.988.664.032.584
b Persediaan	-
c Barang Berharga	-
d Aset Non Produksi	37.419.395.897
Net Lending Borrowing	11.151.710.431.804
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	10.940.291.697.744
a Akuisisi Neto Aset Keuangan	11.046.001.064.774
-Domestik	11.046.001.064.774
-Luar Negeri	-
b Keterjadian Kewajiban	(105.709.367.030)
-Domestik	(105.709.367.030)
-Luar Negeri	-
SILPA Konsolidasian	-

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai

PMTB dibagi dengan PDRB.

Dari tabel laporan operasional tersebut diatas dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp13.281.681.307.437,00 yang terdiri dari:
 - a. Kompensasi pegawai sebesar Rp8.116.642.957.441,00
 - b. Penggunaan barang dan jasa sebesar Rp5.158.304.265.497,00
 - c. Konsumsi aset tetap sebesar Rp0,-
 - d. Manfaat sosial sebesar Rp6.734.084.500,00
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) sebesar Rp1.988.664.032.584,00
3. PDRB Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp113,26 triliun.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terhadap PDRB sehingga angka yang diperoleh adalah sebesar 11,74 persen. Demikian juga kontribusi belanja aset tetap pemerintah sebagai PMTB dari pemerintah dibandingkan dengan nilai PDRB sehingga diperoleh angka sebesar 1,75 persen. Dilihat dari kontribusi tersebut, pengeluaran konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan belanja pegawai bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, misalnya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di triwulan berkenaan. Dengan demikian peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi kurang optimal apabila realisasi belanja pemerintah tidak terserap secara proporsional dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Hal ini berbeda dengan belanja aset tetap pemerintah atau investasi pemerintah yang hanya memiliki kontribusi sebesar 2,74 persen terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Meskipun memiliki kontribusi yang tidak signifikan, namun pengaruh terhadap perekonomian akan dirasakan di masa-masa akan datang karena bersifat jangka panjang.

“Pendapatan negara konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tumbuh 6,1 persen yang didominasi oleh pertumbuhan dari komponen pendapatan perpajakan dalam negeri. Secara Umum belanja negara konsolidasian menurun sebesar 0,7 persen. Tingkat pertumbuhan belanja didominasi belanja barang sebesar 27,02 persen, sedangkan belanja modal terjadi penurunan sebesar 30,95 persen”

V. BERITA FISKAL REGIONAL

Dialog Khusus Keuangan Desa: Bersama Memastikan Terwujudnya *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil-hasil kunjungan ke berbagai wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan, baik dalam rangka pertemuan maupun koordinasi dengan Gubernur/Wakil Gubernur, para Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota ditemukan kondisi lapangan bahwa masih terdapat banyak Desa di wilayah Sumatera Selatan yang belum memiliki Kantor Pemerintahan Desa yang khusus didirikan untuk maksud tersebut dan/atau terpisah dari kediaman Kepala Desa berkenaan. Setidaknya masih terdapat 617 Desa di 14 Kabupaten/Kota yang belum atau tidak memiliki Kantor Kepala Desa secara terpisah dari kediaman Kepala Desa atau sebesar 21,63% Desa dari total 2.853 Desa di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dapat memicu ketidakpastian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan setidaknya pada informasi publik yang seharusnya dapat dikelola dengan baik. Di samping itu pengelolaan data kemasyarakatan desa juga akan mengalami kendala.

Menyikapi kondisi tersebut, pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Gedung Keuangan Negara Palembang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan acara Dialog Khusus Keuangan Desa dengan mengusung tema Bersama Memastikan Terwujudnya *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Acara ini dihadiri pihak Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD dan Kepala DPMD dari 14 Kabupaten/Kota penerima Dana Desa serta Kepala BPS di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, disamping tentunya juga dihadiri oleh para Kepala KPPN dan para Pejabat di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber yang dihasilkan berasal dari Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi, Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui acara tersebut adalah memunculkan ide-ide kreatif berkenaan dengan alternatif penyelesaian permasalahan agar seluruh pemerintah desa di wilayah Sumatera Selatan dapat memenuhi syarat fundamental untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Tabel V.1 Data Kantor Desa di Sumsel

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kantor Desa		%	
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	Musi Rawas	186	186	0	100,00%	0,00%
2	Muratara	82	35	47	42,68%	57,32%
3	Muba	227	225	2	99,12%	0,88%
4	Banyuasin	288	288	0	100,00%	0,00%

5	OKI	314	314	0	100,00%	0,00%
6	OI	227	227	0	100,00%	0,00%
7	Prabumulih	12	12	0	100,00%	0,00%
8	Muara Enim	245	242	3	98,78%	1,22%
9	Lahat	360	144	216	40,00%	60,00%
10	PALI	65	58	7	89,23%	10,77%
11	Empat Lawang	147	0	147	0,00%	100,00%
12	OKU	143	85	58	59,44%	40,56%
13	OKU Selatan	252	129	123	51,19%	48,81%
14	OKU Timur	305	291	14	95,41%	4,59%
Total		2853	2236	617	78,37%	21,63%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel, diolah

Dialog khusus yang berlangsung kurang lebih selama empat jam tersebut berhasil memunculkan adanya kesamaan pandangan diantara para peserta bahwa permasalahan ketersediaan Kantor Desa di Sumatera Selatan merupakan hal yang krusial untuk diselesaikan. Para pemangku kepentingan harus segera memikirkan cara agar kekurangan Balai Desa tersebut dapat segera dibangun sebagai syarat fundamental untuk dapat mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentunya memerlukan usaha bersama dari banyak pihak antara lain dari Pemda agar dapat mengalokasikan dananya dalam APBD, Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi agar dapat mengakomodasi dalam regulasinya serta Kementerian Keuangan dari segi keuangannya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel sebagai inisiator acara tersebut akan menyampaikan permasalahan Kantor Desa ini ke forum yang lebih tinggi untuk mendapatkan tindak lanjut dan ke depan akan senantiasa menjadi mitra bagi Pemda di Wilayah Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 JALAN KAPTEN A. RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG
TELEPON 0711-351476 3, 356534, FAKSIMILE 0711-310891

NOTA DINAS

Nomor: ND-1125 /WPB.07/2019

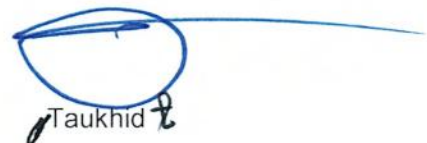
Kepada Yth : Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Agustus 2019

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-61/PB/2017 tanggal 5 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 yang *softcopy*-nya telah kami kirimkan via e-mail ke alamat lo.ditpa@gmail.com.

Adapun materi dalam KFR tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Provinsi Sumsel.
2. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN.
3. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD.
4. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian APBN dan APBD.
5. Berita fiskal regional.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Taukhid

Kp : WPB.07/BD.0201/2019

"Bersama Anda Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan"